

### PERATURAN DESA BABATKUMPUL NOMOR 05 TAHUN 2020

#### TENTANG

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DESA BABATKUMPUL KECAMATAN PUCUK TAHUN ANGGARAN 2021

## PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN PUCUK DESA BABATKUMPUL

Jl. Imam Bonjol 114 Babatkumpul Pucuk Telp. 081331333003
e-mail: pemdesbabatkumpul@gmail.com
LAMONGAN Kode Pos 62257



## KEPALA DESA BABATKUMPUL KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

## PÉRATURAN DESA BABATKUMPUL NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2021

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BABATKUMPUL

#### Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
- 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57).
- 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

## Dengan Kesepakatan Bersama

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABATKUMPUL Dan KEPALA DESA BABATKUMPUL

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BABATKUMPUL Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

| 1  | Pendapatan Desa                          | Rp | 1.628.212.300,00 |
|----|--|----|------------------|
| 2. | Belanja Desa                             | Rp | 1.580.212.300,00 |
|    | Surpuls/Defisit                          | Rp | 48.000.000,00    |
| 3. | Pembiayaan  a. Penerimaan Pembiayaan     | Rp | 1.160.429,70     |
|    | b. Pengeluaran Pembiayaan                | Rp | 48.000.000,00    |
|    | Selisih Pembiayaan (a-b)                 | Rp | (46.839.570,30)  |
|    | Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 1.160.429,70     |

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

#### Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BABATKUMPUL.

Ditetapkan di: BABATKUMPUL Pada tanggal: 30 Desember 2020

KEPALA DESA BABATKUMPUL,

ttd

PRAWITO, SH., MM

Diundangkan di: BABATKUMPUL Pada tanggal : 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA

FAJAR ARISUWITO, S.Pd

**LEMBARAN DESA BABATKUMPUL NOMOR 05 TAHUN 2021** 

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BABATKUMPUL
NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BABATKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2021

| 1.1.01 5.1. Belanja Pegawai Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1.1.02 5.1. Belanja Pegawai Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 265.847.040,00 26.848.00 265.847.040,00 265.847.040,00 265.847.040,00 265.847.040,00 265.847.040,00 265.847.040,00 265.847.040,00 265.847.040,00 265.847.040,00 265.847.040,00 265.847.040,00 265.847.040,00 265. | SUMBERDANA    |
|--|---------------|
| 4.1. Pendapatan Asi Desa   | 5             |
| 1.41.162 300,00  |               |
| SELANJA   BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA   519.575.300,00   |               |
| Section  |               |
| 1.1.   BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA   Fig.575.300,00  |               |
| 1.1.01 1.1.01 1.1.01 1.1.01 1.1.01 1.1.02 1.1.03 1.1.03 1.1.03 1.1.03 1.1.03 1.1.04 1.1.04 1.1.05 1.1.05 1.1.05 1.1.05 1.1.06 1.1.07 1.1.07 1.1.07 1.1.08 1.1.09 1.1.09 1.1.09 1.1.09 1.1.00 1. |               |
| 1.1.01   Pempediaan Pesa   Pempediaan Pemanjanah Desa   Pempediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa   38.925 000,00   7.1.02   Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa   265.847 040,00   7.1.03   Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa   15.159.843,00   7.793.417,00      |               |
| 1.101 5.1. Belanja Pegawai 265.847.040,00 / 265.847.040,0 |               |
| 1.102   Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa   265.847.040,00   7.103   265.847.040,00   7.103   265.847.040,00   7.103   265.847.040,00   7.103   265.847.040,00   7.103   265.847.040,00   7.103   265.847.040,00   7.103   265.847.040,00   7.103   265.847.040,00   7.103   265.847.040,00   7.103   265.847.040,00   7.105   2   | ADD, PBH      |
| 1.1.02 5.1. Belanja Pegawai Penyediaan Penghasian Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 15.159 843,00 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll) Penyediaan Tunjangan BPD Penyediaan Tunjangan BPD Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll) Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Penyediaan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok Penyediaan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah Dengkok Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah Dengkok Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah Dengkok Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah Dengkok Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah Dengkok Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah Dengkok Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah Dengkok Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah Dengkok Penyediaan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah Dengkok Penyediaan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah Dengkok Penyediaan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah Dengkok Penyediaan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah Dengkok Penyediaa |               |
| 11.03   Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa   15.159.843,00   15.159 | ADD, PBH      |
| 1.1.03 5.1. Belanja Pegawai 15.159 843,00 7.793.417,00 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll) 7.793.417,00 Penyediaan Tunjangan BPD 4.300.000,00 Penyediaan Tunjangan BPD 4.300.000,00 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll) 1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll) 1.1.07 S.2 Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 5.700.000,00 Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok 1.1.90 Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok 1.1.93 Operasional LPM 1.200.000,00 Perasional PKK Pelanja Barang dan Jasa Operasional PKK 2.200.000,00 Perasional PKK 2.200.000,00 Perasional Karangtaruna 1.100.000,00 Perasional Karangtaruna 1.100.000,00 Perasional Karangtaruna 1.100.000,00 Perasional Rarang dan Jasa Operasional Karangtaruna 1.100.000,00 Perasional Rarang dan Jasa Operasional Rarang dan Jasa 1.100.000,00 Perasional Rarang dan Jasa Operasional Rarang dan Jasa 1.100.000,00 Perasional Rarang dan Jasa Operasional Rarang dan Jasa 1.100.000,00 Perasional Rarang dan Jasa |               |
| 1.1.04   S.1.   Betanja Pegawai   Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dill)   7.793.417,00   7. | ADD           |
| 1.1.04   D dtl   D d   |               |
| 1.1.05   | ADD, PAD, PBH |
| 1.1.05 1.1.05 1.1.05 1.1.05 1.1.05 1.1.06  Belanja Pegawai Penyediaan Tunjangan BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dil)  1.1.06 1.1.07 1.1.07 1.1.07 1.1.07 1.1.07 1.1.07 1.1.09 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 5.700.000,00 Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok  1.1.90 1.1 |               |
| 1.1.05   | ADD           |
| 1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)  1.1.06 1.1.07 Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok  1.1.90 Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok  1.1.90 Derasional LPM Belanja Barang dan Jasa Operasional PKK Belanja Barang dan Jasa Operasional Karangtaruna Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok  1.1.95 1.1.95 1.1.96 1.1.96 1.1.96 1.1.96 1.1.96 1.1.96 1.1.96 1.1.96 1.1.96 1.1.96 1.1.96 1.1.96 1.1.97 1.1.98  |               |
| 1.1.06   | ADD           |
| 1.1.07 1.1.07 1.1.07 1.1.07 1.1.07 1.1.07 1.1.09 Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok  1.1.90 1.1.90 S.1. Belanja Pegawai Operasional LPM Belanja Barang dan Jasa Operasional PKK Belanja Barang dan Jasa Operasional Karangtaruna Depart of the pengelolaan tanah bengkok  1.1.95 1.1.95 1.1.96 S.2. Belanja Barang dan Jasa Operasional Karangtaruna Belanja Barang dan Jasa Operasional Karangtaruna Belanja Barang dan Jasa Operasional Karangtaruna Belanja Barang dan Jasa  |               |
| 1.1.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 175.850.000,00 17 | ADD           |
| 1.1.90 Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok  1.1.90 5.1. Belanja Pegawai  Operasional LPM  Belanja Barang dan Jasa  Operasional PKK  Belanja Barang dan Jasa  Operasional Karangtaruna  Departuru Belanja Barang dan Jasa  Operasional Karangtaruna  Belanja Barang dan Jasa  Operasional Karangtaruna  Belanja Barang dan Jasa   |               |
| 1.1.90 5.1. Belanja Pegawai  1.1.93 Operasional LPM  1.200.000,00 1  1.1.95 S.2. Belanja Barang dan Jasa  Operasional PKK  Belanja Barang dan Jasa  Operasional Karangtaruna  1.100.000,00 1  1.1.96 S.2. Belanja Barang dan Jasa  Operasional Karangtaruna  Belanja Barang dan Jasa  Operasional Karangtaruna  1.100.000,00 1  1.1.96 S.2. Belanja Barang dan Jasa  | PAD           |
| 1.1.93   |               |
| 1.1.93 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 7.1.1.95 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 7.1.1.96 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 7.1.1.96 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 7.1.1.96 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 7.1.1.96 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1  | ADD           |
| 1.1.95 Operasional PKK 2.200.000,00 2.200.000,00 1.1.95 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 1.1.96 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1 |               |
| 1.1.95 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 1.1.96 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.1.96 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 1.1.00.000,00 1.1.00.000,00 1.1.00.000,00 1.1.00  | ADD           |
| 1.1.96 Operasional Karangtaruna 1.100.000,00 / 1.1.96 5.2. Belanja Barang dan Jasa   |               |
| 1.196 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00  | ADD           |
| 2  |               |
| BIDANO PELANGARANTI EMILIANI   |               |
| 7.200.000,00 Sub Bidang Pendidikan   |               |

Halaman 1

| KODE<br>REKENING |         | URAIAN  | ANGGARAN<br>(Rp) | SUMBERDANA |  |
|------------------|---------|---|------------------|------------|--|
| 1                | 2       | 3   | 4                | 5          |  |
| 2.1.01           |         | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des<br>a (Honor, Pakaian dli) | 7.200.000,00     | DDS        |  |
| 2.1.01           | 52.     | Belanja Barang dan Jasa   | 7.200 000,00     |            |  |
| 2.2.             |         | Sub Bidang Kesehatan  | 69.000.000,00    | -          |  |
| 22.02            |         | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)                      | 3.000.000,00     | DDS        |  |
| 22.02            | 5.2.    | Belanja Barang dan Jasa   | 3 000 000,00     |            |  |
| 2.2.04           |         | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan  | 46.000.000,00    | DOS        |  |
| 2.2.04           | 5.2.    | Belanja Barang dan Jasa   | 46.000.000,00    |            |  |
| 2.2.91           | 4       | Operasional Mobil sehat   | 20.000.000,00    | DDS        |  |
| 2.2.91           | 5.2.    | Belanja Barang dan Jasa   | 20.000.000,00    |            |  |
| 2.3.             |         | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  | 625.000.000,00   |            |  |
| 2.3.12           |         | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)                      | 250.000.000,00   | DDS, PBK   |  |
| 2.3.12           | 5.3.    | Belanja Modal   | 250 000 000,00   |            |  |
| 23.90            |         | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah ( TPT )                         | 375.000.000,00   | DDS, PBK   |  |
| 23.90            | 5.3.    | Belanja Modal   | 375 000 000,00   |            |  |
| 24.              | Marin . | Sub Bidang Kawasan Pemukiman  | 60.000.000,00    |            |  |
| 4.14             |         | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umu<br>m, dll **)           | 60.000.000,00    | DDS        |  |
| 4.14             | 5.3.    | Belanja Modal   | 60,000,000,00    |            |  |
| 2.5.             |         | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup   | 60.000.000,00    |            |  |
| 5.92             |         | Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sung<br>al              | 60.000.000,00    | DDS        |  |
| 5.92             | 5.3.    | Belanja Modal   | 60.000.000,00    |            |  |
| 2.6.             |         | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  | 27.000.000,00    |            |  |
| 28.02            |         | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)                                | 2.000,000,00     | DDS        |  |
| 5.02             | 5.2.    | Belanja Barang dan Jasa   | 2.000.000,00     |            |  |
| 8.92             |         | Pengelolaan jaringan internet desa  | 25.000.000,00    | DDS        |  |
| 6.92             | 5.2.    | Belanja Barang dan Jasa   | 20.000.000,00    |            |  |
| .6,92            | 5.3.    | Belanja Modal   | 5.000.000,00     |            |  |
|                  |         | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN   | 21.000.000,00    |            |  |
| 3.1.             |         | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan                                 | 12.000.000,00    |            |  |
| 1.01             |         | Masyarakat<br>Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa                                  | 12.000.000,00    | DDS        |  |
| 1.01             | 5.3.    | Belanja Modal   | 12.000.000,00    |            |  |
| 12               |         | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan   | 9.000.000,00     |            |  |
| 2.03             |         | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU                       | 9.000.000,00     | PAD        |  |
| 2.03             | 5.2.    | T RI, Raya Keagamaan dii)  Belanja Barang dan Jasa  | 9.000.000,00     |            |  |
|                  |         | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  | 43.837.000,00    |            |  |
| 2                |         | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan   | 10.000.000,00    |            |  |
| 2 05             |         | Pelatihan/Birntek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet                    | 10,000,000,00    | DDS        |  |

22/02/2021 13 24 0

Halaman 2

| KODE   |           |      | URAIAN  | ANGGARAN<br>( Pp ) | SUMBERDANA |
|--------|-----------|------|---|--------------------|------------|
| 1      |           | 2    | 3   | 4                  | 0          |
| 4.2.05 | 5         | 5.3. | Belanja Modal   | 10 000 000,00      |            |
| 43.    | 101       |      | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa                                | 2.400.000,00       | *          |
| 43.91  | NAME OF   |      | Peningkatan kapasitas Kader Pernberdayaan Masyarakat Desa                     | 2.400.000.00       | 006        |
| 4.3.91 |           | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 2.400 000,00       |            |
| 4.4.   |           |      | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan<br>Keluarga          | 21.437.000,00      |            |
| 4.4.90 |           |      | Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga<br>balita | 9.437.000,00       | oos        |
| 4.4.90 |           | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 8.200.000,00       |            |
| 4.4.90 |           | 5.3. | Belanja Modal   | 1.237.000,00       |            |
| 4.4.93 | 100       |      | Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat                           | 12.000.000,00      | 006        |
| 4.4.9  | 3         | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 12.000.000,00      |            |
| 4.5.   | -         |      | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)                    | 10.000.000,00      |            |
| 4.5.9  | 0         |      | Pemberdayaan ekonomi masyarakat   | 10.000.000,00      | DDS        |
| 4.5.9  | 0         | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 10.000.000,00      |            |
| 5      | を         |      | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE                        | 147,600,000,00     |            |
| 5.3.   | N. A.     |      | Sub Bidang Keadaan Mendesak   | 147.600.000,00     |            |
| 5.3.0  | 00        |      | Penanganan Keadaan Mendesak   | 147.600.000,00     | 009        |
| 5.3.   | 00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga   | 147.600.000,00     | 1          |
|        | The same  |      | JUMLAH BELANJA  | 1.580.212.300,00   |            |
|        | -         |      | SURPLUS / (DEFISIT)   | 48.000.000,00      | 1          |
|        |           | 6.   | PEMBIAYAAN  |                    |            |
|        |           | 6.1  | Penerimaan Pembiayaan   | 1.160.429,70       |            |
|        | Section . | 6.2  | Pengeluaran Pembiayaan  | 48,000,000,00      |            |
|        |           |      | PEMBIAYAAN NETTC  | (46.839.570,30)    |            |
|        |           | 1_   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN  | 1.160.429,70       |            |

BABATKUMPUL, 30 Desember 2020 KEPALA DESA BABATKUMPUL

111

PRAWITO, SH.,MM

Diundangkan di : BABATKUMPUL

Pada tanggal : 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA

FAJAR ARISUWITO, S.Pd

LEMBARAN DESA BABATKUMPUL NOMOR 05 TAHUN 2021

Halaman 3



## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DESA BABATKUMPUL KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABATKUMPUL KECAMATAN PUCUK NOMOR: 188/ 05 /413.313.15.1/2020

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BABATKUMPUL
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABATKUMPUL

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Babatkumpul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatkumpul Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dari Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:

10. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamonyan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 tahun 2006 tentang sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamongan tahun 2006 Nomor 14/E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 15/E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor tahun 2014 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten lamongan Tahun

Anggaran 2015;

17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);

18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018;

19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa.

Memperhatikan

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Babatkumpul membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatkumpul tahun anggaran 2021.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2021.

## Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatkumpul Tahun Anggaran 2021.

#### Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Babatkumpul Pada tanggal 30 Desember 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABATKUMPUL

Ketua

SURAJI, SH



## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DESA BABATKUMPUL KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA BABATKUMPUL TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATKIJMPUL KEC. PIJCUK TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor: 027 / 05 / 413.313.15.1 / 2020

pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh, bulan desember tahun dua ribu dua puluh, tempat di Balai Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa batkumpul perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Babatkumpul Tahun Anggaran 2021, Badan Permusyawaratan Desa Babatkumpul Babatkumpul Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Babatkumpul menyatakan menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa batkumpul Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatkumpul Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Babatkumpul

Tanda Tangan:

- 1. <u>SURAJI, SH</u> Ketua
- 2. <u>SULIKAN</u> Anggota
- 3. <u>LISTIYA ZUMROTUL M</u> Anggota
- 4. M. MURDIONO Anggota
- 5. <u>M. ISNAINI</u> Anggota